



PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KOMPENSASI KOMISARIS SERTA DIREKSI, TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Habibi, Abdul Rohman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone, +6224746486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance characteristics and board of commissioners compensation and also board of directors compensation on tax management. Corporate governance characteristics are measured by the size of board, proportion of independent board and application of corporate governance. Board of commissioners and board of directors compensations are measured using the total amount of compensation received in year divided by firm revenue. While tax management is measured using the effective tax rate. This study also tests several control variables namely firm size, profitability, and leverage.

Data for this study are obtained from annual report of non-financial companies listed in Indonesia Exchange Stock (BEI) in 2008-2013. The sampling method used to draw the sample is purposive sampling. The criteria of companies allowed from listed companies in the ratings of CGPI. Final sample is 57 companies from 2008-2013. The hypothesis testing use linear regression analysis.

The results show that application of corporate governance and leverage significantly affects the tax management. While size of board, proportion of independent board, compensation, firm size, and profitability did not significantly affect tax management.

Keyword : corporate governance, board of commissioners compensation and board of directors compensation, tax management.

PENDAHULUAN

Dunia berkembang dengan begitu pesat dalam era globalisasi, salah satunya dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2014). Perubahan yang terjadi menuntut perusahaan-perusahaan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja, terlebih pada tahun 2015 negara-negara ASEAN akan menghadapi era baru liberalisasi, sebagai salah satu tujuan dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kemajuan ekonomi Indonesia saat ini bertolak belakang dengan krisis berkepanjangan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Sejak saat itulah isu *corporate governance* mulai menjadi perhatian serius para pelaku bisnis di Indonesia. Banyak kalangan yang menyebutkan lamanya proses perbaikan ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penerapan *corporate governance* yang masih rendah (Nur'aeni, 2010). Pada tahun 1999 dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan dikeluarkannya Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Menurut Agoes dan Ardana (2009) *corporate governance* atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan *corporate governance* pada

¹ Corresponding author



perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan trend yang baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Hanum, 2013).

Dewan komisaris merupakan instrumen yang dipercaya memiliki peran penting, terutama dalam hal pengawasan manajemen (Fama dan Jansen, 1983). Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Meilinda, 2013). FCGI (2004) menyatakan bahwa dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian, serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Untuk mengurangi konflik akibat masalah agensi tersebut, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Kompensasi sendiri mempunyai fungsi yang vital dalam kelancaran operasional perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kompensasi berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan karyawannya. Selain itu, kompensasi juga sangat berpengaruh bagi perkembangan kinerja karyawan perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh CG terhadap manajemen pajak telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham terhadap CEO dan direksi, sebagai bagian dari komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*.

Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh karakteristik CG dan paket kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan non-keuangan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) untuk menemukan bukti bahwa kebijakan kompensasi, baik secara kas maupun saham, sebagai salah satu mekanisme CG internal dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan komposisi direksi, *entrenchment*, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai *proksi* atas mekanisme *corporate governance* perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme CG terhadap manajemen pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melihat perbedaan penerapan sistem pajak di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Penulis juga termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini mengulang penelitian Minnick dan Noga (2010) yang sebelumnya telah dilakukan di Amerika Serikat dengan adaptasi terhadap karakteristik *corporate governance* di Indonesia.



KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam praktik bisnis, banyak perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna memaksimalkan laba perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Manajemen pajak dilakukan guna menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Strategi manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik *corporate governance* setiap perusahaan, karakteristik yang dimaksud adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan tingkat penerapan *corporate governance*. Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien.

Kompensasi dimaksudkan untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan dewan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal dengan cara meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Yang diukur dengan GAAP ETR

Dalam pedoman umum *good corporate governance*, peran dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam hal pengawasan pengelolaan operasi perusahaan termasuk didalamnya mengenai manajemen pajak. Pada teori agensi yang sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan tindakan oportunistik yang berpotensi manajemen lakukan, dengan kata lain keberadaan dewan komisaris mampu meminimalisir konflik agensi (*agency conflict*) yang ada.

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR

Pengaruh Persentase Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Yang diukur dengan GAAP ETR

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana, (2006). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Komisaris independen merupakan bagaian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya.

Berdasarkan teori agensi, apabila jumlah komisaris independen semakin besar pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka dalam menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori agensi adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR

Pengaruh Penerapan CG Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Yang diukur dengan GAAP ETR

Masalah agensi pada sebuah perusahaan yang disebabkan oleh asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Salah satu cara untuk memonitor masalah agensi adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien (Irawan dan Aria, 2012).

H3 : Penerapan CG perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR

Pengaruh Tingkat Kompensasi Komisaris serta Direksi Terhadap Manajemen Pajak Yang diukur dengan GAAP ETR

Dalam teori keagenan muncul masalah yang disebut *agency conflict* yang disebabkan oleh tidak selarasnya kepentingan pemilik modal (*principal*) dengan kepentingan manajer (*agent*). Pemilik modal menghendaki pertambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, disatu sisi para manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya. Pemberian kompensasi diharapkan mampu mengatasi *agency conflict* yang ada. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Meilinda, 2013).

H4 : Tingkat kompensasi komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang diprosikan menggunakan GAAP ETR yaitu *effective tax rate* berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Proksi ini memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam mengukur manajemen pajak. Untuk mengestimasi nilai GAAP ETR model ini menggunakan total beban pajak satu tahun sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak satu tahun sebagai penyebut (Dyrenge et al, 2008).

Variabel independen terdiri dari jumlah komisaris, persentase komisaris independen, penerapan CG perusahaan dan kompensasi komisaris serta direksi. Jumlah komisaris dihitung dengan sekala rasio yaitu perbandingan jumlah dewan komisaris perusahaan dibagi jumlah komisaris terbanyak pada sampel (Subramaniam et al, 2009). Persentase komisaris independen diukur dengan skala rasio yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Khan, 2010). Penerapan CG perusahaan dihitung dengan menggunakan skor CG yang dipublikasikan oleh IICG, indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan CG (Devita, 2011). Variabel kompensasi komisaris serta direksi adalah total yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan dewan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan *revenue* perusahaan (Meilinda, 2012).

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural dari total aset perusahaan pada akhir tahun, profitabilitas dihitung dengan nilai ROA (*Return On Asset*), sedangkan tingkat hutang perusahaan dihitung dengan nilai DER (*Debt to Equity Ratio*).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2008-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pertimbangan dan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan masuk peringkat CGPI periode 2008-2013.
2. Perusahaan sampel memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun 2008 sampai 2013.
3. Perusahaan sampel mengungkapkan data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi.
4. Perusahaan sampel memiliki nilai GAAP (ETR) 0-1

Metode Analisis

Analisis regresi berganda digunakan pada pengujian hipotesis penelitian ini, Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = 0 + 1BOARD_t + 2INDEP_t + 3CG_t + 5COMP_t + 4SIZE_t + 5ROA_t + 6DER_t + \epsilon$$

Keterangan:

ETR	: Terdiri dari GAAP ETR dan Cash ETR
0	: Konstanta
BOARD	: Jumlah Dewan Komisaris
INDEP	: Persentase Komisaris Independen
CG	: Skor <i>Corporate Governance</i>
COMP	: Kompensasi Direksi
SIZE	: Ukuran Perusahaan dihitung dengan Ln Total Aset
ROA	: <i>Return on Asset</i> dihitung dengan laba bersih dibagi total aset
DER	: <i>Debt to Equity Ratio</i> dihitung dengan total hutang dibagi total aset
ϵ	: <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan perincian sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu:

Tabel 1
Perincian Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan masuk peringkat CGPI	91
Perusahaan memiliki laba setelah pajak bernilai negatif	0
Perusahaan tidak memiliki data jumlah dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi komisaris sertadireksi	(20)
GAAP ETR < 0 atau > 1	(14)
Jumlah sampel	57

Sumber : data yang diolah, 2015

Deskripsi Variabel

Berikut merupakan gambaran sampel berdasarkan analisis statistik deskriptif:

Tabel 2
Deskripsi variabel penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARD	57	3,00	10,00	5,7193	1,53244
INDEP	57	0,30	,66670	,3909035	,06784947
CGINDEX	57	66,51	90,58	79,9104	6,45993
COMP	57	0,00076	,02195	,0050878	,00457253
SIZE	57	25,76951	32,48267	30,0556204	1,44025290
ROA	57	0,00083	,34926	,1042643	,08448037
DER	57	0,10401	7,74539	1,4997523	1,68138639
GAAPETR	57	0,02077	,65413	,2712466	,12197525
Valid N (listwise)	57				

Sumber : Hasil output SPSS, 2015

Variabel independen jumlah dewan komisaris (BOARD) diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris pada setiap perusahaan. Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris dari perusahaan sampel diperoleh sebesar 5,7193 atau sebanyak 5 orang. Hal ini berarti bahwa jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan sampel rata-rata sebanyak 5 orang. Jumlah anggota dewan komisaris yang paling sedikit adalah sebanyak 3 orang dan yang paling banyak sebanyak 10 orang. Nilai standar deviasi ukuran dewan komisaris diperoleh sebesar 1,5324. Nilai tersebut relatif kecil dibanding nilai rata-rata jumlah dewan komisaris dari perusahaan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris masih memiliki variasi yang relatif kecil.

Deskripsi persentase dewan komisaris independen (INDEP) dari perusahaan sampel diperoleh mean sebesar 0,3909 atau 39,09%. Hal ini berarti bahwa jumlah komisaris independen dari perusahaan sampel rata-rata sebesar 39,09% dari seluruh jumlah dewan komisaris. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris independen. Jumlah terendah adalah sebesar 0,3000 atau 30,00% dan jumlah tertinggi mendapai 0,6667 atau 66,67%.

Data penelitian sebagaimana diringkas pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan rata-rata indeks *corporate governance* (CGINDEX) diperoleh sebesar 79,9104 dengan nilai indeks minimal sebesar 66,51 dan nilai indeks maksimum sebesar 90,58. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampel survey CGPI pada perusahaan sampel selama periode 2008 – 2013 menunjukkan berada pada kategori terpercaya. Hal menunjukkan bahwa secara rata-rata penerapan GCG oleh perusahaan sampel sudah terpercaya dan diterapkan pada lebih dari 75% dari kondisi idealnya.

Deskripsi variabel Kompensasi (COMP) yang diukur dengan nilai kompensasi bagi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap revenue yang diperoleh perusahaan sampel rata-rata adalah sebesar 0,0051 atau sebesar 0,51% dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kompensasi terendah adalah sebesar 0,0008 dan kompensasi tertinggi mencapai 0,0220.

Variable ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung dari logaritma natural dari total asset menunjukkan rata-rata sebesar 30,0556 dengan nilai ukuran perusahaan terkecil adalah sebesar 25,7695 dan nilai ukuran perusahaan yang tertinggi adalah sebesar 32,4827.

Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on asset (ROA) menunjukkan rata-rata sebesar 0,1043 atau 10,43%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mendapatkan laba bersih hingga sebesar 10,43% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata-rata positif berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki kemampuan mendapatkan laba. Nilai ROA terendah adalah sebesar 0,0008 sedangkan nilai ROA tertinggi adalah sebesar 0,3493.

Variable tingkat hutang perusahaan (DER) yang dihitung dari rasio total hutang terhadap total ekuitas menunjukkan rata-rata sebesar 1,4998. Nilai rata-rata DER di atas 1 menunjukkan perusahaan banyak yang menggunakan hutang dibanding modal sendirinya. Nilai DER terendah adalah sebesar 0,1040 dan nilai DER tertinggi adalah sebesar 7,7454.

Deskripsi mengenai manajemen pajak yang diukur dengan GAAP *effective tax rate* (GAAP ETR) menunjukkan rata-rata sebesar 0,2712. Hal ini berarti bahwa perusahaan mencatatkan pajak

yang dibebankan kepada perusahaan sampel rata-rata sebesar 27,12% dari jumlah laba sebelum pajak pada perusahaan sampel. Nilai GAAP ETR tertinggi adalah sebesar 0,6541 sedangkan nilai ETR terendah adalah sebesar 0,0208.

Uji Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini menempatkan variabel adjusted spread sebagai variabel dependennya. Perhitungan analisis regresi ini menggunakan bantuan program SPSS. Hasil Pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi hasil regresi

Variabel	Koef	t	sig
(Constant)	0.417	1.190	0.240
BOARD	-0.186	-1.893	0.064
INDEP	0.298	1.523	0.134
CGINDEX	-0.006	-2.155	0.036
COMP	-4.762	-1.225	0.226
SIZE	0.010	0.735	0.466
ROA	0.144	0.782	0.438
DER	0.040	4.203	0.000
F	7,191		
Sig F	0.000		
Adj R2	0.436		

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan statistik deskriptif nilai rata-rata ukuran dewan komisaris dari perusahaan sampel diperoleh sebesar 5,7193 atau sebanyak 5 orang. Hal ini berarti bahwa jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan sampel rata-rata sebanyak 5 orang. Jumlah anggota dewan komisaris yang paling sedikit adalah sebanyak 3 orang dan yang paling banyak sebanyak 10 orang. Nilai standar deviasi ukuran dewan komisaris diperoleh sebesar 1,5324. Nilai tersebut relatif kecil dibanding nilai rata-rata jumlah dewan komisaris dari perusahaan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris masih memiliki variasi yang relatif kecil.

Hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris terhadap GAAP ETR menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai $t = -1,893$ dengan probabilitas 0,064 ($p > 0,05$). Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GAAP ETR. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. Arah negatif berarti bahwa, ketika terjadi peningkatan pada jumlah dewan komisaris maka terjadi peningkatan pada manajemen pajak perusahaan dengan ditandai penurunan tingkat pajak efektif.

Hasil penelitian ini menolak penelitian Minnick dan Noga (2010), dimana jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan menghasilkan fungsi pengawasan yang baik serta dapat meyakinkan manajemen untuk melakukan manajemen pajak. Akan tetapi, hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Coles *et al.* (2008) yang menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang semakin banyak akan membuat performa perusahaan semakin tinggi dan semakin efektif dalam melakukan manajemen pajak.

Pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak

Dalam penelitian ini persentase komisaris independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Pada statistik deskriptif menunjukkan nilai mean sebesar 0,3909. Hal ini berarti bahwa jumlah komisaris independen dari perusahaan sampel rata-rata sebesar 39,09% dari seluruh jumlah dewan komisaris.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris independen. Jumlah terendah adalah sebesar 0,3000 atau 30,00% dan jumlah tertinggi mendapai 0,6667 atau 66,67%. Hasil pengujian variabel proporsi komisaris independen terhadap GAAP ETR menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai $t = 1,523$ dengan probabilitas 0,134 ($p > 0,05$). Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GAAP ETR. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

Pengujian ini menunjukkan kecenderungan semakin besar persentase komisaris independen maka manajemen pajak yang dilakukan perusahaan semakin berkurang, dengan ditandai meningkatnya nilai ETR. Suyanto (2012) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin meningkat, manajemen akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dan meningkatkan transparansi pengelolaan perusahaan, sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bernard (2011), dimana jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik.

Pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak

Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* diukur dengan skor CGPI, indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan CG. Dari hasil statistik deskriptif diperoleh data rata-rata indeks *corporate governance* (CGINDEX) diperoleh sebesar 79,9104 dengan nilai indeks minimal sebesar 66,51 dan nilai indeks maksimum sebesar 90,58. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampel survey CGPI pada perusahaan sampel selama periode 2008 – 2013 menunjukkan berada pada kategori terpercaya. Hal menunjukkan bahwa secara rata-rata penerapan GCG oleh perusahaan sampel sudah terpercaya dan diterapkan pada lebih dari 75% dari kondisi idealnya.

Hasil pengujian variabel CGINDEX terhadap GAAP ETR menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai $t = -2,155$ dengan probabilitas 0,036 ($p < 0,05$). Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa CGPI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GAAP ETR. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap GAAP ETR, Arah koefisien negatif berarti bahwa penerapan *corporate governance* yang lebih baik dapat menurunkan GAAP ETR. Sedangkan manajemen pajak yang baik ditandai dengan rendahnya nilai ETR.

Pengujian ini mendukung penelitian Minnick dan Noga (2010) yang menemukan pengaruh yang signifikan antara penerapan CG perusahaan dengan tingkat pengelolaan pajak perusahaan. Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan yang profesional (efektif dan efisien) menjadi sebuah unsur untuk menghasilkan margin laba yang lebih baik pula. Salah satu hal yang mempengaruhi margin laba adalah pengelolaan pajak yang efisien karena terkait biaya yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan *bottom-line performance*.

Pengaruh kompensasi komisaris serta direksi terhadap manajemen pajak

Dalam penelitian ini kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi diukur dengan menggunakan perbandingan jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi selama setahun dengan jumlah penjualan perusahaan. Berdasarkan statistik deskriptif perusahaan sampel rata-rata adalah sebesar 0,0051 atau sebesar 0,51% dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kompensasi terendah adalah sebesar 0,0008 dan kompensasi tertinggi mencapai 0,0220.

Hasil pengujian variabel Kompensasi komisaris serta direksi terhadap GAAP ETR menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai $t = -1,225$ dengan probabilitas 0,126 ($p >$

0,05). Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa Kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GAAP ETR. Dengan demikian Hipotesis 2 ditolak. Arah signifikan menjelaskan bahwa setiap kenaikan nilai kompensasi akan mengakibatkan penurunan nilai GAAP ETR, penurunan nilai tingkat pajak efektif menunjukkan manajemen pajak yang semakin baik.

Pengujian ini mendukung penelitian Minnick dan Noga (2010) serta Amstrong et al (2012), yang membuktikan bahwa pemberian kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Karena manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal pengelolaan pajak yang dapat meminimalisasi tarif pajak efektif.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Dari hasil analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme corporate governance jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen pajak GAAP ETR.
2. Mekanisme corporate governance persentase komisaris independen memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak GAAP ETR.
3. Penerapan *corporate governance* diperoleh memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen pajak GAAP ETR. Perusahaan yang memperoleh penilaian CGPI yang lebih besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah.
4. Kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap GAAP ETR.

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penggunaan model GCG dengan CGPI yang hanya dilakukan pada perusahaan dengan jumlah yang terbatas.

Perusahaan yang masuk pada peringkat CGPI tidak semuanya terdaftar di BEI, sehingga jumlah sampel menjadi terbatas yaitu 57 dari tahun 2008 sampai 2013. Keterbatasan selanjutnya adalah tidak seluruh perusahaan sampel melakukan pengungkapan kompensasi terhadap komisaris seta direksi, karena belum menjadi informasi yang wajib diungkapkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.

REFERENSI

- Agoes, S. dan Ardana I.C. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53: 391-411.
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Data Produk Domestik Bruto Indonesia 2000-2013*, Jakarta.
- Devita, Lusiyana. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 3, Nomor 1, November 2011, hal. 71-89 ISSN: 2085-9945
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* 83 (1): 61-82.
- Forum Corporate Governance Indonesia*. 2004. *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta.
- Hanum, Hasemi Rodhian. 2013. "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. 2012.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 35-60.
- Meilinda, Maria. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.



- Michelon dan Parbonetti. 2010. *The Effect of Corporate Governanc on Sustainability disclosure*. Jurnal of Mnagement and Governance Vol. 14.
- Minnick, Kristina and Tracy Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance* 16: 703-718.
- Nur'aeini, Dini. 2010. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Subramaniam, Nava, L, Me.Manus, and Jiani Zhang 2009. "Corporate Governance, Firm Characterristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol.24, No, 4, pp. 316-339.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandaana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana.